

Nama : Feby Yolanda S

NPM : 2313031068

Kelas : 2023 C

Matkul : Akuntansi Sektor Publik

PILIHAN GANDA

*Catatan : **Kalimat bercetak tebal Adalah Jawaban!***

1. Sebuah pemerintah daerah berencana membangun sebuah perpustakaan umum baru. Dalam konteks karakteristik sektor publik, justifikasi utama proyek ini yang membedakannya dari proyek komersial adalah...

- a) Potensi keuntungan dari denda keterlambatan pengembalian buku.
- b) Menciptakan lapangan kerja bagi para pustakawan dan staf administrasi.
- c) Peningkatan nilai properti di sekitar lokasi perpustakaan yang akan menguntungkan pengembang real estate.
- d) Peningkatan literasi dan penyediaan akses informasi yang merata bagi seluruh warga, terlepas dari kemampuan ekonomi mereka.**
- e) Efisiensi biaya konstruksi yang lebih rendah dibandingkan jika dibangun oleh pihak swasta.

2. Ketika terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan penurunan pendapatan pajak, pemerintah pusat memutuskan untuk tetap melanjutkan program subsidi pupuk bagi petani kecil. Keputusan ini paling baik dijelaskan oleh pengaruh lingkungan sektor publik pada aspek...

- a) Ekonomi, karena pemerintah harus merespons kondisi pasar yang berubah.
- b) Demografi, karena jumlah petani kecil sangat signifikan di negara tersebut.
- c) Hukum, karena ada undang-undang yang mewajibkan pemerintah memberikan subsidi.
- d) Politik, karena menjaga stabilitas sosial dan dukungan dari sektor petani merupakan prioritas kebijakan meskipun kondisi fiskal sedang sulit.**
- e) Teknologi, karena tidak ada teknologi alternatif untuk menggantikan pupuk.

3. Perbedaan mendasar antara akuntabilitas vertikal dan horizontal dalam organisasi sektor publik dapat diilustrasikan melalui skenario:

- a) Vertikal: Gubernur menyampaikan laporan kepada masyarakat.
Horizontal: Kinerja gubernur dinilai oleh media massa.
- b) Vertikal: Kepala dinas melaporkan anggaran ke DPRD. Horizontal: Kepala dinas berkoordinasi dengan dinas lain.

- c) Vertikal: Direktur BUMN melapor ke Menteri BUMN. Horizontal: Direktur BUMN tersebut membandingkan kinerjanya dengan BUMN lain.
- d) Vertikal: Menteri melaporkan kinerjanya kepada Presiden. Horizontal: Kinerja kementerian tersebut diawasi oleh lembaga Ombudsman.**
- e) Vertikal: Sebuah rumah sakit daerah diaudit oleh BPK. Horizontal: Rumah sakit tersebut dievaluasi oleh komite etik internal.

4. Sebuah kota menghadapi masalah polusi udara yang parah akibat emisi industri. Jika pemerintah kota memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang beralih ke teknologi hijau, ini merupakan cerminan dari karakteristik lingkungan sektor publik yang...

- a) Terikat oleh prosedur birokrasi yang kaku dan tidak inovatif.
- b) Beroperasi dalam pasar persaingan sempurna.
- c) Menyediakan layanan yang tidak memiliki unsur pengecualian (non-excludable).
- d) Dipengaruhi oleh tuntutan untuk mengatasi eksternalitas negatif.**
- e) Memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan laba.

5. Sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan cagar alam menghadapi dilema: meningkatkan pendapatan dari pariwisata dengan membangun lebih banyak fasilitas, atau membatasi pembangunan untuk menjaga kelestarian ekosistem. Dilema ini paling mencerminkan konflik inheren dalam sektor publik antara...

- a) Akuntabilitas vertikal dan horizontal.
- b) Efisiensi ekonomi dan efektivitas pencapaian tujuan sosial/lingkungan.**
- c) Kebutuhan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang.
- d) Sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan.
- e) Anggaran berbasis kinerja dan anggaran tradisional.

6. Sebuah rumah sakit umum daerah ingin mengukur efektivitas program penanggulangan diabetes. Manajer RSUD mengusulkan penggunaan indikator 'jumlah kunjungan pasien diabetes ke poliklinik'. Mengapa informasi dari akuntansi manajemen sektor publik akan mengkritik indikator ini sebagai ukuran efektivitas?

- a) Indikator tersebut mengukur output, tetapi gagal menangkap outcome atau dampak yang sebenarnya.**
- b) Indikator tersebut sulit diukur dan membutuhkan biaya besar.
- c) Indikator tersebut hanya mengukur input, bukan output program.
- d) Indikator tersebut tidak dapat dibandingkan dengan rumah sakit lain.

- e) Indikator tersebut tidak memiliki relevansi dengan tujuan finansial rumah sakit.

7. Pemerintah kota sedang mempertimbangkan dua metode pengumpulan sampah: (A) sistem saat ini dengan 10 truk besar yang rutanya panjang, atau (B) sistem baru dengan 20 truk kecil yang rutanya lebih pendek dan terfokus. Akuntansi manajemen akan merekomendasikan analisis yang mana untuk membantu pengambilan keputusan ini?

- a) Analisis break-even point untuk menentukan berapa banyak sampah yang harus dikumpulkan agar tidak rugi.
- b) Analisis perputaran aset untuk mengukur efisiensi penggunaan truk sampah.
- c) Analisis profitabilitas pelanggan untuk mengidentifikasi area perumahan yang paling menguntungkan.
- d) Analisis biaya standar (standard cost analysis), dengan menetapkan biaya standar per ton sampah yang diangkut.
- e) **Analisis biaya relevan (relevant cost analysis), dengan membandingkan biaya bahan bakar, pemeliharaan, dan gaji supir antara kedua opsi.**

8. Untuk meningkatkan transparansi, sebuah dinas pendidikan mempublikasikan 'biaya per siswa' untuk setiap sekolah di wilayahnya. Namun, ditemukan bahwa sekolah di daerah terpencil memiliki biaya per siswa yang jauh lebih tinggi. Informasi tambahan dari akuntansi manajemen yang paling penting untuk melengkapi data ini adalah...

- a) **Data rincian pendorong biaya (cost drivers) seperti biaya logistik distribusi buku dan skala ekonomi (jumlah siswa per sekolah).**
- b) Data perbandingan biaya per siswa dengan sekolah swasta.
- c) Data tingkat kelulusan siswa dari setiap sekolah.
- d) Data total anggaran yang diterima masing-masing sekolah dari pemerintah pusat.
- e) Data jumlah guru yang telah disertifikasi di setiap sekolah.

9. Penerapan Balanced Scorecard (BSC) di organisasi sektor publik seringkali perlu dimodifikasi dari versi korporat. Modifikasi yang paling fundamental adalah...

- a) Fokus secara eksklusif pada perspektif 'Pembelajaran dan Pertumbuhan' untuk meningkatkan kapasitas ASN.
- b) Menambahkan perspektif baru yaitu 'Kepuasan Politik' untuk mengukur dukungan dari legislatif.

- c) Mengganti perspektif 'Proses Bisnis Internal' dengan 'Proses Birokrasi'.
- d) Menghilangkan perspektif keuangan karena sektor publik tidak mencari laba.
- e) Menempatkan perspektif 'Misi' atau 'Pelanggan/Masyarakat' di puncak hierarki, di atas perspektif keuangan.**

10. Sebuah dinas kebersihan menggunakan sistem 'activity-based costing' (ABC) untuk menganalisis biayanya. Ditemukan bahwa aktivitas 'pengangkutan sampah dari lokasi sulit dijangkau' memakan biaya yang sangat tinggi. Informasi ini paling berguna bagi manajemen untuk...

- a) Membenarkan permintaan kenaikan anggaran secara umum kepada DPRD.
- b) Menghapus layanan pengangkutan sampah dari area tersebut untuk menghemat biaya.
- c) Mengevaluasi ulang proses atau teknologi yang digunakan, misalnya dengan mempertimbangkan penggunaan kendaraan yang lebih kecil dan lincah untuk area tersebut.**
- d) Menetapkan tarif retribusi sampah yang lebih tinggi bagi warga di area sulit dijangkau.
- e) Membandingkan total biaya dengan dinas kebersihan di kota lain.

11. Seorang kepala dinas kesehatan baru menemukan bahwa stafnya cenderung hanya fokus pada pencapaian target yang tertulis dalam dokumen anggaran, dan enggan melakukan inovasi atau merespons kebutuhan mendesak yang tidak dianggarkan. Situasi ini merupakan contoh dari kelemahan sistem pengendalian manajemen yang disebut...

- a) Kelebihan pengendalian (excessive control).
- b) Kurangnya keselarasan tujuan (lack of goal congruence).**
- c) Kegagalan pengendalian umpan balik (feedback control failure).
- d) Sentralisasi keputusan (centralization of decision).

e) Manipulasi data (data manipulation).

12. Pemerintah menerapkan sistem di mana alokasi anggaran untuk universitas negeri pada tahun berikutnya sebagian ditentukan oleh 'jumlah publikasi ilmiah internasional' yang dihasilkan pada tahun ini. Jenis pengendalian manajemen yang digunakan di sini adalah...

a) **Pengendalian diagnostik (diagnostic control), karena digunakan untuk memantau pencapaian target kinerja kunci.**

b) Pengendalian detektif (detective control), karena mendeteksi universitas mana yang kinerjanya buruk.

c) Pengendalian preventif (preventive control), karena mencegah universitas menjadi tidak produktif.

d) Pengendalian keyakinan (belief system), karena menanamkan keyakinan tentang pentingnya penelitian.

e) Pengendalian batasan (boundary control), karena menetapkan batasan pada apa yang tidak boleh dilakukan oleh universitas.

13. Sebuah lembaga pemerintah menerapkan sistem pengendalian manajemen yang sangat ketat, dengan puluhan formulir yang harus diisi untuk setiap pengeluaran kecil dan persetujuan berlapis. Dampak disfungsional yang paling mungkin timbul dari sistem seperti ini adalah...

a) Penyembunyian informasi (information hiding) antar departemen.

b) Meningkatnya partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran.

c) Fokus jangka pendek di mana manajer hanya peduli pada target bulanan.

d) Meningkatnya kreativitas staf dalam mencari celah aturan.

e) **Terjadinya penundaan operasional (*operational delays*) dan perilaku kaku yang menghindari risiko (*risk aversion*).**

14. Untuk memastikan program 'Kartu Indonesia Pintar' tepat sasaran, pemerintah membangun sistem informasi terintegrasi yang memadukan data dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan data kependudukan. Pembangunan sistem informasi ini merupakan bentuk dari...

a) **Pengendalian tindakan (action control), khususnya pada kategori pembatasan perilaku (behavioral constraints).**

- b) Pengendalian budaya (cultural control).
- c) Pengendalian hasil (results control).
- d) Sistem pengendalian interaktif (interactive control system).
- e) Pengendalian personal (personal control).

15. Manajer sebuah taman nasional diberikan otonomi untuk mengelola anggarannya sendiri dan dinilai berdasarkan kombinasi tiga indikator: (1) peningkatan populasi satwa kunci, (2) tingkat kepuasan pengunjung, dan (3) efisiensi biaya operasional. Struktur pusat pertanggungjawaban yang paling sesuai untuk unit ini adalah...

- a) Pusat Biaya (Cost Center), karena ia bertanggung jawab atas biaya operasional.
- b) Pusat Kebijakan/Diskresioner (Discretionary Expense Center), karena output-nya (konservasi, kepuasan) sulit dihubungkan secara langsung dengan input moneter.**
- c) Pusat Investasi (Investment Center), karena ia mengelola aset taman nasional.
- d) Pusat Pendapatan (Revenue Center), karena ia menghasilkan pendapatan dari tiket masuk.
- e) Pusat Laba (Profit Center), karena ia harus menyeimbangkan antara pendapatan dan biaya.

16. Dalam proses penganggaran sektor publik, sering terjadi fenomena di mana departemen sengaja mengajukan anggaran yang lebih tinggi dari yang sebenarnya dibutuhkan. Praktik ini dikenal sebagai 'budgetary slack' atau 'padding'. Dari perspektif prinsipal-agen, fenomena ini paling baik dijelaskan sebagai...

- a) Strategi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana.
- b) Konsekuensi logis dari penerapan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting).
- c) Hasil dari partisipasi anggaran yang terlalu rendah dari level bawah.
- d) Bentuk efisiensi untuk mengantisipasi inflasi di masa depan.

- e) **Masalah informasi asimetris, di mana agen (manajer departemen) mengetahui lebih banyak tentang kebutuhan riilnya daripada prinsipal (penyusun anggaran pusat).**

17. Pemerintah suatu negara memutuskan untuk mengubah pendekatannya dari sekadar memberikan anggaran kepada Kementerian Pendidikan (input), menjadi mengalokasikan anggaran berdasarkan target 'peningkatan skor PISA siswa sebesar 10 poin dalam 3 tahun' (outcome). Pergeseran ini merupakan transisi menuju...

- a) Line-item budgeting.
- b) Incremental budgeting.
- c) Capital budgeting.

- d) **Performance-based budgeting (anggaran berbasis kinerja).**

- e) Zero-based budgeting.

18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran krusial dalam siklus penganggaran daerah. Pada tahap mana peran DPRD paling dominan dalam menentukan alokasi akhir anggaran?

- a) Tahap audit, di mana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa laporan keuangan.
- b) Tahap pelaporan dan evaluasi, di mana pemerintah daerah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- c) Tahap persiapan, di mana setiap dinas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- d) Tahap implementasi, di mana dinas-dinas mulai membelanjakan anggaran yang telah disetujui.

- e) **Tahap ratifikasi/otorisasi, di mana Raperda APBD dibahas, dinegosiasikan, dan disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.**

19. Pemerintah pusat menetapkan pagu indikatif untuk setiap kementerian/lembaga di awal proses perencanaan. Tujuan utama dari penetapan pagu indikatif ini adalah...

- a) Untuk mempercepat proses penganggaran dengan menghilangkan tahap negosiasi.
- b) Untuk mengunci alokasi anggaran sehingga tidak dapat diubah selama pembahasan dengan DPR.
- c) Untuk memberikan kebebasan penuh bagi kementerian dalam merencanakan program tanpa batasan.
- d) Untuk memastikan bahwa perencanaan anggaran selaras dengan kerangka ekonomi makro dan postur fiskal yang ditetapkan pemerintah.**
- e) Sebagai bentuk final dari alokasi anggaran belanja yang akan diterima setiap kementerian.

20. Jika pemerintah menerapkan pendekatan 'Zero-Based Budgeting' (ZBB) secara murni untuk menyusun APBN, konsekuensi yang paling signifikan adalah...

- a) Peran DPR dalam proses pembahasan anggaran akan berkurang secara signifikan.
- b) Anggaran belanja pegawai akan menjadi satu-satunya komponen yang tidak perlu dijustifikasi ulang.
- c) Proses penganggaran akan menjadi lebih cepat dan sederhana karena menggunakan data tahun lalu sebagai dasar.
- d) Alokasi anggaran akan lebih fokus pada pembiayaan proyek-proyek investasi jangka panjang.
- e) Setiap program dan kegiatan, baik yang lama maupun yang baru, harus melalui proses justifikasi yang ketat seolah-olah program tersebut baru.**

21. Sebuah pemerintah daerah memiliki beberapa program: (1) Pembangunan jalan tol baru, (2) Program vaksinasi balita, (3) Pembayaran gaji guru, dan (4) Pembelian alat tulis kantor. Jika pemerintah daerah tersebut mengklasifikasikan anggarannya berdasarkan jenis, program manakah yang akan masuk dalam kategori Anggaran Modal (Capital Budget)?

- a) Pembayaran gaji guru, karena merupakan investasi pada sumber daya manusia.

- b) Program vaksinasi balita, karena memberikan manfaat kesehatan jangka panjang.
- c) Semua program di atas karena semuanya menggunakan dana APBD.
- d) Pembangunan jalan tol baru, karena menciptakan aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.**
- e) Pembelian alat tulis kantor, karena merupakan aset yang dimiliki pemerintah.

22. Pemerintah memperkenalkan sistem 'Planning, Programming, and Budgeting System' (PPBS). Seorang analis mengkritik sistem ini dengan menyatakan bahwa PPBS sangat baik dalam menjawab pertanyaan 'Apa tujuan kita?' dan 'Program apa yang bisa mencapai tujuan itu?', tetapi seringkali lemah dalam menjawab pertanyaan...

- a) 'Berapa total anggaran yang kita miliki tahun ini?'
- b) 'Bagaimana kinerja program ini dibandingkan dengan tahun lalu?'
- c) 'Apa saja rincian belanja yang diperlukan untuk setiap program?'
- d) 'Siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan setiap program?'**
- e) 'Apakah program ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang?'

23. Perbedaan utama antara Anggaran Tradisional (Line-Item Budget) dengan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Budget) terletak pada orientasinya. Jika Anggaran Tradisional berorientasi pada 'Input', maka Anggaran Berbasis Kinerja berorientasi pada...

- a) Output dan Outcome, yaitu apa yang dihasilkan dan dampak apa yang dicapai dari pengeluaran.**
- b) Penghematan, yaitu membelanjakan dana sesedikit mungkin.
- c) Struktur Organisasi, yaitu alokasi dana untuk setiap departemen.
- d) Kepatuhan, yaitu memastikan pengeluaran tidak melebihi pagu yang ditetapkan.

e) Proses, yaitu memastikan semua prosedur diikuti dengan benar.

24. Dalam konteks APBN di Indonesia, ketika pemerintah dan DPR menyetujui alokasi dana untuk 'Program Pembangunan Infrastruktur Prioritas', ini adalah contoh dari pendekatan penganggaran yang menggabungkan elemen...

a) Hanya Zero-Based Budgeting, karena setiap proyek infrastruktur harus dijustifikasi dari nol.

b) Hanya Incremental Budgeting, karena alokasi infrastruktur hanya sedikit meningkat dari tahun lalu.

c) PPBS dan Anggaran Berbasis Kinerja, karena fokus pada program (infrastruktur) untuk mencapai tujuan strategis (perencanaan) dan diukur hasilnya (kinerja).

d) Hanya Line-Item Budgeting, karena yang terpenting adalah rincian biaya pembangunan setiap proyek.

e) Anggaran Statis dan Anggaran Fleksibel, karena pagu ditetapkan di awal tetapi bisa disesuaikan.

25. Sebuah badan layanan umum (BLU) seperti rumah sakit atau universitas diberikan fleksibilitas untuk menggunakan kembali pendapatan yang mereka peroleh (Pendapatan Negara Bukan Pajak - PNBP) tanpa harus menyetor seluruhnya ke kas negara terlebih dahulu. Jenis anggaran yang paling sesuai untuk menggambarkan model ini adalah...

a) Zero-Based Budget, karena setiap tahun mereka harus menjustifikasi semua programnya.

b) Anggaran Fleksibel (Flexible Budget), karena pagu belanja dapat disesuaikan dengan tingkat realisasi pendapatan dari layanan.

c) Line-Item Budget, karena mereka harus merinci setiap penggunaan PNBP.

d) Anggaran Modal (Capital Budget), karena pendapatan digunakan untuk investasi aset baru.

e) Anggaran Statis (Static Budget), karena target pendapatan dan belanja ditetapkan di awal tahun.

26. Pemerintah kota sedang mengevaluasi proposal pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di depan sebuah mall. Manfaat utama proyek ini

adalah peningkatan keselamatan pejalan kaki. Dalam analisis investasi publik, bagaimana cara mengukur (memonetisasi) manfaat 'peningkatan keselamatan' ini?

- a) Dengan menghitung potensi pendapatan dari iklan yang bisa dipasang di JPO tersebut.
- b) Dengan mengestimasi penurunan biaya medis dan hilangnya produktivitas ekonomi dari calon korban kecelakaan yang berhasil dihindari.**
- c) Dengan melakukan survei kepada pengguna mall tentang berapa banyak mereka bersedia membayar untuk adanya JPO (willingness to pay).
- d) Dengan menghitung nilai waktu yang dihemat oleh pejalan kaki karena tidak perlu menunggu lalu lintas sepi.
- e) Manfaat keselamatan tidak dapat diukur dalam nilai uang dan harus dikeluarkan dari analisis biaya-manfaat.

27. Dua proyek investasi publik sedang dipertimbangkan: Proyek A memiliki Net Present Value (NPV) sebesar Rp 10 Miliar dan Benefit-Cost Ratio (B/C Ratio) 1.5. Proyek B memiliki NPV Rp 15 Miliar dan B/C Ratio 1.2. Jika pemerintah memiliki anggaran yang tidak terbatas, proyek manakah yang seharusnya dipilih dan mengapa?

- a) Proyek A, karena memiliki B/C Ratio yang lebih tinggi, menunjukkan efisiensi penggunaan dana yang lebih baik.
- b) Proyek B, karena memiliki NPV yang lebih tinggi, yang menunjukkan kontribusi absolut terhadap kesejahteraan masyarakat yang lebih besar.**
- c) Keduanya harus dipilih karena keduanya memiliki NPV positif dan B/C Ratio di atas 1.
- d) Proyek A, karena risiko investasinya kemungkinan lebih rendah.
- e) Tidak ada cukup informasi, perlu diketahui Internal Rate of Return (IRR) dari kedua proyek.

28. Pemerintah menggunakan 'social discount rate' (tingkat diskonto sosial) yang lebih rendah dibandingkan 'commercial discount rate' untuk mengevaluasi proyek jangka panjang seperti pembangunan bendungan atau program reboisasi. Alasan utama di balik penggunaan tingkat diskonto yang lebih rendah ini adalah...

- a) Karena pemerintah dapat meminjam dana dengan tingkat bunga yang lebih murah dibandingkan perusahaan swasta.
- b) Karena proyek pemerintah dijamin bebas risiko sehingga tidak memerlukan premi risiko.
- c) Untuk memberikan bobot yang lebih besar pada kesejahteraan generasi mendatang yang akan menerima manfaat dari proyek tersebut.**
- d) Karena inflasi di sektor publik diperkirakan akan selalu lebih rendah.
- e) Untuk membuat lebih banyak proyek pemerintah terlihat layak secara finansial.

29. Sebuah proyek pembangunan sistem irigasi memiliki biaya investasi awal yang besar, tetapi akan memberikan manfaat panen yang lebih baik bagi petani selama 30 tahun ke depan. Namun, proyek ini juga akan menyebabkan hilangnya sebagian kecil kawasan hutan lindung. Dalam analisis biaya-manfaat sosial (Social Cost-Benefit Analysis), bagaimana 'hilangnya hutan lindung' harus diperhitungkan?

- a) Diabaikan, karena sulit untuk diukur dalam nilai moneter.
- b) Diperlakukan sebagai manfaat negatif yang akan mengurangi total manfaat panen.
- c) Diperlakukan sebagai biaya sosial (external cost) dengan mencoba memonetisasi nilai jasa ekosistem yang hilang (misalnya, sebagai pengatur air, penyerap karbon).**
- d) Menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup, dan tidak termasuk dalam analisis proyek irigasi oleh Kementerian Pertanian.
- e) Hanya disebutkan dalam analisis kualitatif sebagai catatan kaki, tanpa dimasukkan dalam perhitungan NPV.

30. Analisis sensitivitas dalam studi kelayakan investasi publik dilakukan untuk...

- a) Menghitung tingkat diskonto sosial yang paling tepat untuk digunakan.
- b) Memilih proyek terbaik di antara beberapa alternatif proyek yang saling eksklusif.

- c) Menentukan apakah NPV proyek bernilai positif atau negatif.
- d) Menguji seberapa besar perubahan hasil kelayakan (misalnya NPV) jika salah satu asumsi kunci (misalnya, biaya konstruksi atau harga output) berubah.**
- e) Mendistribusikan manfaat proyek secara adil kepada berbagai kelompok masyarakat.

31. Pemerintah menetapkan tarif untuk layanan pembuatan paspor di bawah biaya penuh (full cost) yang dibutuhkan untuk menyelenggarakannya. Namun, tarif tersebut ditetapkan sama untuk semua warga negara tanpa memandang tingkat pendapatan. Prinsip penentuan harga yang paling dominan dalam kasus ini adalah...

- a) Harga pasar (market price) untuk mendorong persaingan dengan swasta.
- b) Subsidi parsial dan prinsip kesetaraan akses (equity of access), di mana layanan dianggap sebagai hak yang harus terjangkau oleh semua.**
- c) Marginal cost pricing untuk mencapai efisiensi alokatif.
- d) Pemulihan biaya penuh (full cost recovery) untuk menjaga keberlanjutan fiskal.
- e) Diskriminasi harga (price discrimination) untuk mencapai keadilan sosial.

32. Sebuah BUMD air minum (PDAM) menghadapi dilema: menaikkan tarif air untuk menutupi biaya investasi pipa baru yang sangat dibutuhkan, atau mempertahankan tarif rendah yang terjangkau bagi masyarakat miskin. Jika PDAM memutuskan untuk menerapkan tarif blok progresif (semakin banyak pemakaian, semakin mahal harga per meter kubiknya), pendekatan ini mencoba menyeimbangkan antara...

- a) Harga pasar dan intervensi pemerintah.
- b) Efisiensi operasional dan keuntungan maksimal.
- c) Akuntabilitas publik dan otonomi manajemen.
- d) Persaingan dengan pemasok air swasta dan monopoli alami.

- e) **Kebutuhan investasi (cost recovery) dan prinsip keterjangkauan (affordability) bagi pengguna kecil.**

33. Pemerintah menyediakan layanan pendidikan dasar secara gratis bagi semua warga negara. Alasan fundamental di balik kebijakan 'harga nol' (zero price) ini, dari perspektif ekonomi publik, adalah karena pendidikan dasar...

- a) Merupakan industri yang mengalami kegagalan pasar karena informasi asimetris.
- b) Memiliki biaya penyelenggaraan (cost of provision) yang sangat rendah.
- c) **Dianggap sebagai barang merit (merit good) yang menghasilkan eksternalitas positif yang besar bagi masyarakat.**
- d) Merupakan barang publik murni (pure public good) yang non-rival dan non-excludable.
- e) Untuk menciptakan lapangan kerja bagi para guru dan tenaga kependidikan.

34. Untuk memasuki sebuah taman nasional, pengunjung domestik dikenakan tiket Rp 50.000 sementara pengunjung asing dikenakan tiket Rp 250.000. Kebijakan penetapan harga yang berbeda ini merupakan contoh dari...

- a) Marginal cost pricing, di mana harga tiket ditetapkan setara dengan biaya tambahan untuk melayani satu pengunjung lagi.
- b) Two-part tariff, di mana ada biaya masuk tetap dan biaya tambahan per aktivitas.
- c) **Diskriminasi harga tingkat ketiga (third-degree price discrimination) berdasarkan segmentasi pasar (kemampuan membayar).**
- d) Subsidi silang, di mana pengunjung asing mensubsidi pengunjung domestik.
- e) Full cost recovery, di mana total pendapatan tiket harus menutupi semua biaya operasional taman.

35. Pemerintah memutuskan untuk tidak memungut biaya sama sekali (gratis) untuk penggunaan jembatan yang baru dibangun, meskipun biaya pembangunannya sangat mahal. Keputusan ini paling mungkin dibenarkan secara ekonomi jika...

- a) Penggunaan jembatan dianggap sebagai hak asasi manusia yang fundamental.
- b) Pemerintah ingin memaksimalkan pendapatan dari pajak bahan bakar kendaraan yang melintasi jembatan.
- c) Jembatan tersebut diperkirakan akan sangat ramai sehingga tidak mungkin menerapkan tarif.
- d) **Biaya untuk membangun gerbang tol dan mempekerjakan petugas (transaction cost) lebih mahal daripada potensi pendapatan yang akan diterima.**
- e) Jembatan tersebut dibangun menggunakan utang luar negeri.